

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ardhani Nazil, 2021, *Pengawasan Terhadap Mahkamah Konstitusi Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan Kehakiman*, Salatiga, hlm. 3.
- Asshiddiqie Jimly, 2016, *Perkembangan Kontemporer Etika Materiel dan Formil di Sektor Publik*, Jakarta Timur, Version 3, hlm. 103-104
- Busro, M. 2018, *Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia*, dikutip kembali oleh Hasibusn, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bohari, H, 1982, *Pengawasan Keuangan Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Ismatullah Dedi dan Ahmad Beni, (2018), *Hukum Tata Negara (Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan Di Negara Republik Indonesia)*, Pustaka Setia, Bandung.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RF), *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jilid II,(Jakarta: CV Masagung, 1994)
- Muhammad A., 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cet. Pertama), h. 15.
- Marzuki, Mahmud P., 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 20
- Marzuki, Mahmud P., 2016, *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group, Jakarta, h. 95
- Nawawi, H. Hadari, 1992, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Cetakan II, (Jakarta: Erlangga)
- Rizal Isnanto, *Buku Ajar Etika... h.12.*
- Sujanto, 1985, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Cetakan II, (Jakarta: Ghalia Indonesia). h. 17
- Sidharta A., *Etika dan Kode Etik Hukum... h. 234.*
- Soemantri Sri, 2006, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, 1978*, dan Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*,
- Syahrizal Ahmad, 2006, *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 263.
- Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia... h. 19-20.*
- Soekanto Soerjono, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 14.
- Suparto, *Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi di Indonesia*, (Riau: Fakultas Hukum Universitas Riau), h.3.
- Suhrawadi K. Lubis, 2014, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta.

Jurnal

- Ahsin A., Maret 2010, “*Desains Konstitusional Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. VII No. 1, hlm. 60-80.

- Agung Bagya, 2017, "Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Indonesia", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol, 24.
- Andi. Dkk, Desember 2023, *Menyoal Etika Profesi Hukum Dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Syarat Usia Capres dan Cawapres Perspektif Risalatul Qada 'Umar*, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol 1 (11).
- Abdulkadir M., (2006). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT Citra Bakti. Hlm 77.
- Chaidir Ellydar dan Suparto, 2017, Perlunya Pengawasan Terhadap Kode Etik dan Prilaku Hakim Konstitusi dalam rangka menjaga Martabat dan Kehormatannya, "Jurnal UIR Law Review" Volume 01 Nomor 02, hal. 112.
- Cantika Dhea MZ. dkk, 2023, *Analisis Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Pemberhentian Ketua MK Anwar Usman Terkait Putusan Batas Usia Capres dan Cawapres Pada Pemilu 2024*, Jurnal Ilmu Hukum, sosial, dan humaniora, 1 (2) : 85-94
- Haryono D., 2011, "Perdebatan Hukum Penerapan Ultra Petita Dalam Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Dasar". Jurnal Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 4, No. 1, hlm. 11.
- Lexy J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), hlm. 103.
- Manan Bagir, Juli 2000, "Peningkatan Fungsi Kontrol Masyarakat Terhadap Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif", dalam Makalah yang disampaikan dalam Forum Orientasi dan Tatap Muka Tingkat Nasional Kasgoro (Formatnas) di Cipanas Cianjur.
- Niru A. S., (2020). Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. VIX (2). Hlm. 3.
- Nuh Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 120
- Sukanto, beberapa pengertian di bidang pengawasan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h.17
- Sumaryono E., 1995, *Etika Profesi Hukum: Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius).
- Priyo B., 2018, "Analisis Kebijakan Pengawasan Melekat di Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah". Vol.3. NO. 5.
- Yatimim Abdullah, 2006, *Pengantar Study Etika*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,) h. 4

Skripsi

- Irma Handayani, (2018). *Penegakan Pelanggaran Kode Etik Hakim Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No. 01/MKMK-SPP/II/2017)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nazil Ardhani, (2021). *Pengawasan Terhadap Mahkamah Konstitusi Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan Kehakiman*, Skripsi, Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.
- Nengsi Wulandari, (2022). *Kedudukan Dan Pelaksanaan Kewenangan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqih Siyasah*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Sarif, H. A., & Firdaus, S. U. (2018). *Pengaturan Fungsi Pengawasan Internal Terhadap Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka* (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014). *Skripsi, Res Publica*, 2(1). Hlm. 63.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi

Putusan Nomor: 5/MKMK/L/11/2023 Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Syarat Usia Capres dan Cawapres

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor: 13/info-III/BAP/DE/2016 tanggal 15 Maret 2016.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Internet

http://www.academia.edu/34996829/TEORI_SISTEM_HUKUM_LAWRENCE_M._FRIEDMN/2018/05/01.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/langgar-5-prinsip-kode-etik--anwar-usman-dicopot-darijabatan-ketua-mk-lt654a47cfc992c/?page=all>

https://ylbhi.or.id/informasi/siaran_pers/rilis-ylbhi-dan-18-lbh-kantor-se-indonesia-atas-putusan-majelis-kehormatan-mk/